

Akuntabilitas Publik Organisasi Pemerintah : Studi pada Sekretariat Pemerintah Aceh

Zainuddin¹

Eliana²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh

²Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang, Banda Aceh

zainuddin@serambimekkah.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh audit sektor publik terhadap akuntabilitas publik pada pemerintah Aceh. Populasi penelitian adalah seluruh Pejabat Pengelolaan Keuangan yang ada pada Sekretariat pemerintah Aceh yang berjumlah sebanyak 134 orang, dan sampel penelitian sebanyak 57 orang. Hasil penelitian didapat audit sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada pemerintah Aceh. Hasil ini menunjukkan bahwa pentingnya audit sektor publik dalam rangka menciptakan akuntabilitas sektor publik. Nilai R sebesar 0,509 berarti bahwa hubungan audit sektor publik dengan akuntabilitas publik adalah positif dan dapat dikatakan berhubungan sedang. Sedangkan, nilai R² sebesar 0,259 yang berarti bahwa akuntabilitas publik pada pemerintah Aceh dapat dijelaskan oleh variabel audit sektor publik sebesar 25,9% dan selebihnya sebesar 74.1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hal disebabkan bahwa untuk terciptanya akuntabilitas sektor publik bukan hanya ditentukan oleh satu variabel saja.

Kata kunci: audit sektor publik, akuntabilitas publik dan pemerintah

Pendahuluan

Perkembangan kehidupan nasional saat ini semakin dinamis yang diwarnai oleh semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga menuntut pengelolaan administrasi pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel. Reformasi yang terus berlangsung hingga sekarang telah menyentuh aspek-aspek fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Dengan mencuatnya konsep tata kelola pemerintahan yang baik di era reformasi membuat sistem akuntabilitas publik muncul sebagai isu yang menonjol dan menjadi tuntutan bagi semua pemerintah daerah untuk menerapkan program kerja dan kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh anggaran publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dimana, setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mempertanggung jawabkan segala tindakannya kepada masyarakat sebagai pihak pemangku kepentingan dalam pengelolaan anggaran publik.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas sektor publik terdiri dari dua bentuk yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) serta akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas kepada pihak yang lebih tinggi kewenangannya, sementara akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya (Mahmudi, 2013:9). Selanjutnya, akuntabilitas publik mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran secara konsistensi dan prioritas. Namun dalam praktiknya akuntabilitas di sektor publik jauh dari yang dicita-citakan. Kondisi ini dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek *administrative accountability* dan *professional accountability*, sedikitnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian, dari aspek *legal accountability* dan *Political accountability*, isu yang menunjukkan buruknya akuntabilitas pemerintah adalah banyaknya kasus korupsi yang terjadi di daerah berawal dari penyelewengan dana di daerah. Selanjutnya, dari aspek *ethical accountability*, buruknya kinerja akuntabilitas bisa dilihat dari banyaknya dana yang tidak terserap

dengan nilai SILPA rata-rata tinggi. Persoalan lain adalah banya alokasi anggaran daerah yang di peruntukkan bagi belanja aparatur dari pada belanja langsung untuk rakyat.

Untuk tercapai akuntabilitas publik pada Sekretariat Daerah Aceh mensyaratkan adanya sistem pengawasan yang komprehensif atas rencana-rencana yang telah ditetapkan secara konsisten bagi kebutuhan publik. Salah satu syarat yang dibutuhkan adalah terselenggaranya audit sektor publik secara efektif. Audit sektor publik dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan hasil pelaksanaan program kerja pemerintah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalangi (2012) menyatakan bahwa audit sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi dan berbagai ketimpangan pada tata kelola pemerintah. Tindakan koreksi tidak hanya dilakukan terhadap pimpinan dan pejabat publik namun juga terhadap rencana kegiatan yang berangkutan serta aturan-aturan pelaksanaannya (Halim, 2007:53). Dengan terlaksananya kegiatan pemeriksaan secara efektif maka pengelolaan pemerintahan akan mampu mencapai program kerja dan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan seluruh kegiatan tersebut kepada publik. Kemudian, berdasarkan uraian sebelumnya dapat diformulasikan pertanyaan penelitian adalah apakah audit sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas publik Pemerintah Aceh.

Tinjauan Literatur

Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologis yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya Ilmiati dan Suhardjo (2012). Akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Ilmiati dan Suhardjo (2012). Komariah *et. al* (2007) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat tersebut. (2011:74). Kemudian Sulistioni (2005) menjelaskan pemerintah yang akuntabel adalah Pemerintah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut; 1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat, 2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, 3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, 4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan 5) adanya saran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Akuntabilitas Publik

The Governmental Accounting Standards Board's Concept Statement No. 2 dalam (Mardiasmo, 2004:213) menyatakan bahwa akuntabilitas sektor publik merupakan kewajiban manajer sektor publik untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan yang diembannya. Mahmudi (2013:9) menjelaskan akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada si pemberi mandat (Principal).

Adisasmita (2011:90) dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah perlu prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabel.

Audit

Menurut Agoes (2008:2) audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Kemudian *American Association Committee* dalam Guy (2007:5) mendefinisikan kegiatan audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepadapemakai yang bekepentingan.

Selanjutnya, Rahayu dan Ely (2010:1) menyatakan bahwa audit adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti atau pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan criteria yang ditetapkan.

Audit Sektor Publik

Menurut UU Nomor 15 tahun 2004 Audit Sektor Publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan Negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Mardiasmo (2008:231) mengungkapkan bahwa *Value for Money audit* merupakan ekspresi pelaksanaan lembaga sector publik yang mendasarkan pada tiga elemen dasar yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas

1. Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang termurah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value
2. Efisiensi: tercapainya output yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas: menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output (target/result).

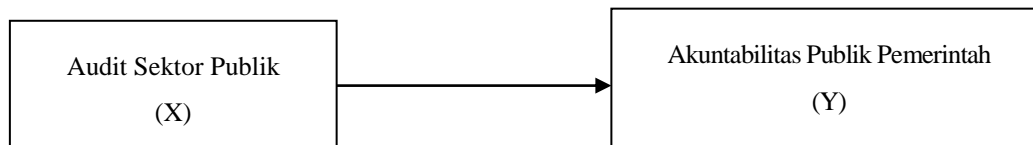
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) dijadikan sebagai standar audit di lingkungan keuangan Negara. SPKN ini merupakan revisi dari Standar Audit Pemerintahan (SAP) 1995. UU Nomor 15 tahun 2004 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), terdapat tiga jenis audit keuangan Negara, yaitu:

- a. *Audit Keuangan, yaitu audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.*
- b. *Audit Kinerja, yaitu audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik.*
- c. *Audit dengan Tujuan Tertentu, yaitu audit khusus, diluar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas hal yang diaudit.*

Menurut Kalangi (2012) dapat diperoleh manfaat dari audit sektor publik adalah:

- a. Terjaminnya transparansi, yaitu keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara. Rakyat berhak tahu kemana dan untuk apa anggaran Negara dibelanjakan. Dalam pertanggungjawaban Keuangan Negara, masyarakat perlu diberikan hak untuk mengetahui pertanggungjawaban Keuangan Negara yang dilakukan oleh Negara atau daerah. Minimal, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah perlu dipublikasikan sehingga masyarakat dapat menilai pertanggungjawaban tersebut.
- b. Terjaminnya Akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu merupakan landasan penerapan anggaran berbasis kinerja. Artinya, dalam pertanggung jawaban Keuangan Negara, akan dilihat kinerja apa yang telah dicapai oleh Pemerintah dalam menghabiskan dana APBN/APBD. Jika tidak ada kinerja yang dicapai maka tidak boleh se-sen-pun uang Negara dibelanjakan.
- c. Memudahkan DPR/DPRD mengambil keputusan, yaitu laporan pertanggungjawaban Pemerintah (Perhitungan Anggaran Negara) dan laporan pertanggungjawaban kepala daerah disampaikan kepada DPR/DPRD, wajib diperiksa terlebih dahulu oleh BPK-RI. Dengan telah diperiksanya laporan keuangan tersebut dapat lebih menjamin bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan/peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Membantu Kejaksaan dalam proses investigasi, yaitu mempercepat proses pemberantasan tindak pidana korupsi BPK melakukan pemeriksaan investigasi atas masalah yang mengandung tindak pidana korupsi. Apabila dalam proses pemeriksaan investigasi tersebut ditemukan adanya tindak pidana korupsi maka hasil investigasi tersebut dilaporkan kepada pihak kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian pihak kejaksaan dapat memperoleh bukti awal untuk dilanjutkan dalam tahap penyidikan dan penuntutan di pengadilan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian ini seperti terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan tinjauan kepustakaan serta kerangka pemikiran penelitian sebelumnya, maka dapat diformulasikan hipotesis penelitian ini adalah audit sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Pemerintah Aceh.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintah provinsi Aceh di Kantor Sekretariat Daerah Aceh. Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006: 121). Sementara Sampel adalah sebagian atau mewakili populasi yang diteliti (Arikunto, 2009:108). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pejabat Pengelolaan Keuangan yang terdiri dari Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Bendaharawan pada Kantor Sekretariat Daerah Aceh yang berjumlah sebanyak 134 pejabat. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Slovin dan Sevila (Ginting et.al, 2008:132) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

N = Populasi

n = Sampel

e = Tingkat kepercayaan / ketepatan yang diinginkan (90% = 0,10)

Sehingga, dari jumlah poplasi sebesar 134 orang dapat dicari sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{134}{1 + 134 (0.1)^2} = \frac{134}{2.34} = 57.26 \text{ dibulatkan } 57 \text{ orang}$$

Untuk lebih jelasnya jumlah sampel dalam penelitian ini seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Populasi dan Sampel Penelitian

No	Jabatan	Populasi	Sampel
1	Kepala Bagian	32	14
2	Kepala Sub Bagian	94	40
3	Bendaharawan	8	3
	Jumlah	134	57

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perorangan (Sekaran, 2006:75). Pengumpulan data primer dilakukan dengan pembagian kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya sebagai tempat jawaban bagi responden (Sekaran, 2006:82). Skala pengukuran dalam penelitian ini seperti pada tabel.

Tabel 3. Skala Pengukuran

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu akuntabilitas publik sebagai *dependent variable* dan audit sektor publik sebagai *independent variable*. Untuk lebih jelas definisi dan operasionalisasi variabel seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Definisi dan Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Akuntabilitas publik (Y)	Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan (Adisasmita, 2011:89).	Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia
			Keputusan sesuai standar etika, nilai-nilai yang berlaku dan -prinsip administrasi yang benar
			Adanya kejelasan dari sasaran
			Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi
			Adanya konsistensi dan prioritas dalam target operasional
2	Audit sektor publik (X)	Proses pengumpulan dan penilaian bukti atau pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan (Rahayu dan Ely, 2010:1).	Proses sistematis
			Mengevaluasi bukti secara objektif.
			Assersi
			Kriteria yang ditetapkan
			Kompeten dan independen
			Pelaporan

Peralatan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana, dan formulasi regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bx + e$$

Notasi: Y= Akuntabilitas publik, x = Audit sektor publik, b= Koefisien Regresi, a = konstanta, dan e = Error Term

Setelah data dikumpulkan dilakukan uji validitas dan uji reabilitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak di ukur secara nyata. Validitas instrument tersebut akan menggambarkan tingkat kemampuan kuesioner untuk mengukur objek-objek yang diteliti (Sudarmanto, 2010:78). Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefficient of Correlation*, dengan tingkat signifikansi di bawah 5%. (*internal consistency*) yang berarti item-item pertanyaan tersebut dapat mengukur aspek yang sama. Dengan kata lain, apabila r hitung > r tabel maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

Realibilitas instrument menggambarkan kepercayaan kepada kemantapan alat ukur yang digunakan yaitu angket. Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas yang baik atau dapat dipercaya apabila alat ukur

tersebut stabil dan konsisten sehingga alat ukur tersebut akan dapat memberikan hasil pengukuran yang serupa dan tidak berubah-ubah (Sudarmanto, 2010:89). Menurut Malhotra (2004) suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai di atas 0,6.

Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik, yaitu 1) Pengujian normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data penelitian masing-masing variabel telah menyebar secara normal atau tidak, hal ini dapat dilakukan dengan melihat sebaran *standarized* pada kurva *P-P* plots dan Histogram, bila *standarized residual* berada pada kisaran garis normal maka data mempunyai distribusi normal, 2) Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011:105). Untuk menguji adanya multikolonieritas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai toleransi serta VIF (*Variance Inflation Factor*). Multikolonieritas terjadi jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%. Nilai VIF lebih besar dari 10, apabila VIF kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan objektif.

Kemudian, 3) Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011:139). Salah satu cara yang digunakan dalam mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan cara menggunakan uji *Glejser* yaitu dengan meregres nilai *absolute residual* terhadap variabel bebas.

Formulasi pengujian hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

H_0 : Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.
Artinya audit sektor publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah Aceh.

H_a : Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima.
Artinya audit sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah Aceh.

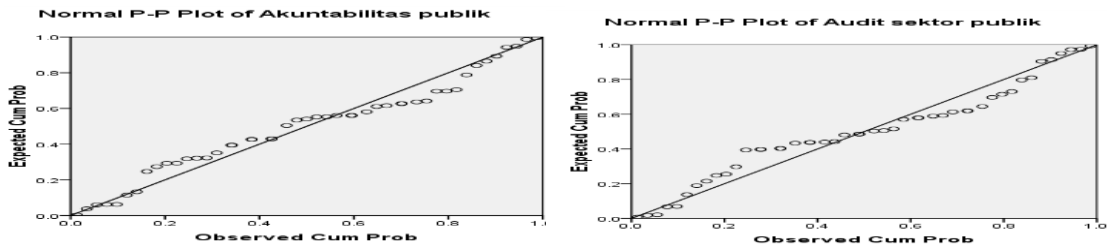
Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil uji validitas dalam penelitian ini seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

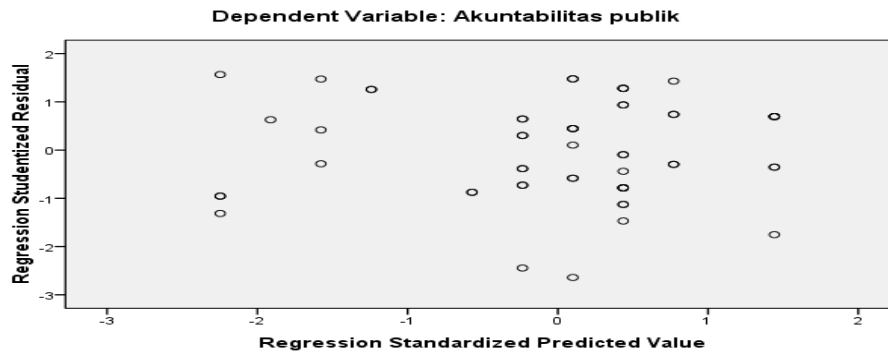
Item Pernyataan		Koefisien Korelasi	Nilai Kritis r N = 57	Keterangan
B1	Akuntabilitas publik	0,723	0,266	Valid
B2		0,913	0,266	Valid
B3		0,734	0,266	Valid
B4		0,805	0,266	Valid
B5		0,781	0,266	Valid
C1	Audit sektor publik	0,860	0,266	Valid
C2		0,715	0,266	Valid
C3		0,859	0,266	Valid
C4		0,326	0,266	Valid
C5		0,852	0,266	Valid
C6		0,682	0,266	Valid

Sumber :Data Primer (diolah), 2015



Gambar 2. Uji Normalitas

Hasil *scatterplot* heterokedasitas diperlihatkan seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 3. Uji heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar uji normalitas dapat dinyatakan bahwa titik-titik mendekati garis normal atau garis lurus. Jadi dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Gambar Uji heteroskedastisitas dapat dijelaskan bahwa plot amatan terhadap residual menyebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu, sehingga tidak terjadi asumsi heteroskedastisitas.

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dari hasil regresi linier, seperti pada table berikut ini:

Tabel 6. Hasil Regresi & Korelasi Diterminan

Model		Unstandardized Coefficients		<i>t</i> hitung	<i>t</i> tabel	Sig.
		<i>B</i>	Std. Error			
1	(Constant)	1.395	0.577	2.417		0.019
	Audit sektor publik	0.694	0.158	4.388	2.003	0.000
<i>R</i> = 0.509 <i>R</i> Square = 0.259 Adjusted <i>R</i> Square = 0.246						

Berdasarkan tabel di atas dapat diformulasikan persamaan linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,395 + 0,694x + e$$

Berdasarkan hasil regresi linier sederhana didapat t_{hitung} sebesar 4,388 dan t_{tabel} sebesar 2,003. Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Artinya audit sektor publik berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada pemerintah Aceh. Nilai konstanta sebesar 1,395 yang berarti bahwa akuntabilitas publik tetap terjadi walaupun tidak adanya variabel audit sektor publik.

Nilai koefisien sebesar 0,694 yang bermakna bahwa setiap terjadi atau dilakukan audit sektor publik, maka akan meningkatkan akuntabilitas publik di pemerintah Aceh sebesar 69,4%. Hal ini terjadi karena apabila dilakukan audit sektor publik sudah barang tentu akan terciptanya akuntabilitas dalam setiap penggunaan budget dan dapat terciptanya keadaan yang minimal terjadinya penyimpangan yang disebabkan akan diketahui saat dilakukan audit itu sendiri. Koefisien korelasi R sebesar 0.509 menjelaskan derajat hubungan (korelasi) antara variabel audit sektor publik dengan akuntabilitas publik adalah positif dengan keeratan hubungan 50,9%. Artinya audit sektor publik pada pemerintah aceh memiliki hubungan sedang. Sementara koefisien R^2 adalah sebesar 0.259 dapat diartikan bahwa kemampuan independen variabel dalam menjelaskan variabilitas dependent variable sebesar 25,9% sedangkan sisanya 74,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan adalah:

1. Audit sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada pemerintah Aceh dengan nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan besarnya pengaruh adalah sebesar 0.694.
2. Koefisien R sebesar 0,509 menjelaskan hubungan audit sektor publik dengan akuntabilitas publik adalah positif dan relatif sedang.
3. Koefisien R^2 sebesar 0,259 kemampuan variabel independen dapat menjelaskan akuntabilitas publik sebesar 25,9% dan sisanya sebesar 74,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. .

Referensi

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agoes, S. (2008). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Arikunto, S. (2009). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: CV. Rineka Eka Cipta.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fahrojih & Najih. (2008). *Menggugat Peran DPR dan BPK Dalam Reformasi Keuangan Negara*. Jakarta: TRANS.
- Guy, M. (2008). *Auditing*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Massofa (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akuntabilitas. Dikutip dari <https://massofa.wordpress.com/2008/10/10/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-akuntabilitas/>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilmiati, F. & Yohanes, S. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Semarang). *Juraksi 1(1)*.
- Kalangi, L. (2012). Peranan Auditing Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah, *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi UNSRAT*, Sulawesi Utara.
- Komariah, et.al. (2007). Manajemen Anti Korupsi Dalam penyelenggaraan SMP Negeri 5 Kota Bandung, *Jurnal Ilmiah Fakultas Administrasi Pendidikan*, Bandung.
- Mardiasmo. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIE YKPN.
- Malhotra, N.K. (2005). *Marketing Research: An Applied Orientation (4th ed.,)* New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Modul Diklat Pembentukan Auditor Anggota Tim Ahli (2007), *Sistem Pengendalian Manajemen*, Pusdiklatwas BPKP.
- Nasucha, C. (2007). *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Raba, M. (2006). *Akuntabilitas: konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press.
- Rahayu, S.K. & Suhayati, E. (2010). *Auditing Konsep dasar dan Pedoman Pemeriksaan Publik*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Rohman, H. (2010). Akuntabilitas Penganggaran Publik Di Daerah, di akses 20 Novemver 2014 dari www.facebook.com/notes/public-administration-community.
- UURI No 15 tahun 2004 *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Sulistioni, G. (2005). *Fiqh Korupsi : Amanah VS Kekuasaan*. Nusa Tenggara Barat: Somasi.
- Sudarmanto, R. G. (2005). *Analisis regresi Linier Berganda dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Suharto, H. (2006). Compliance Audit Pemerintah Daerah. *Media Akuntansi*. Edisi 26. Mei – Juni. pp. 14 – 15, Jakarta
- Wulandari, Indah (2009) Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintahan Kota Padang. *Journal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, Sumatera Utara